

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures*. Di Indonesia kasus korupsi sudah menjadi hal wajar dalam ruang lingkup para pejabat negara untuk menguntungkan diri sendiri, dan banyak juga para pejabat yang melakukan korupsi di bebaskan begitu saja. Biasanya hal seperti ini terletak pada pertimbangan hakim yang kurang tepat dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada pada persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat normatif, yang menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji ketidakkonsistenan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana korupsi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat ketidaktepatan hakim dalam memberikan pertimbangan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang kurang memperhatikan salah satu alat bukti yang sah yaitu saksi, dan mengakibatkan timbulnya putusan bebas yang diberikan kepada pelaku. Ketidaktepatan pertimbangan hakim ini menimbulkan akibat hukum yaitu kegagalan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan, dan menimbulkan pemikiran dalam ruang lingkup masyarakat bahwa korupsi dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius.

Kata Kunci : Ketidaktepatan, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Corruption is categorized as an extraordinary crime due to its systemic, endemic, and widespread nature, which not only harms the state's financial resources but also violates the social and economic rights of the broader community. Thus, its eradication requires comprehensive and extraordinary measures. In Indonesia, corruption cases have become common among government officials who aim to benefit themselves, with many corrupt officials often being acquitted. Such situations are typically caused by judges' inaccuracies in evaluating the evidence presented during trials.

This research employs a normative legal research method, utilizing a statute approach, case approach, and conceptual approach to analyze the inconsistencies in judges' considerations when issuing acquittals for corruption offenders.

The findings of this study reveal that judges often make inaccurate considerations, particularly by neglecting one of the valid pieces of evidence, namely witness testimony, leading to the acquittal of offenders. These inaccuracies result in legal consequences, including the failure of the judicial system to uphold justice. This situation creates public perception that corruption is tolerated and not seriously addressed.

Keywords: *Inaccuracy, Corruption, Judicial Consideration*